



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa implikasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan perekonomian, dengan fokus pada belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak;
  - b. bahwa dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin akibat kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. bahwa dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat dan penyediaan bahan pangan, dibutuhkan pemberian bantuan langsung pangan daerah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat daerah yang terkena dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

*Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  12. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 114/II/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.


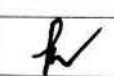



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. *Corona Virus Disesase* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Langsung Pangan Daerah yang selanjutnya disebut BLPD adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data base yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada msing-masing individu dan rumah tangga.
8. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan.
9. Agen Penyalur adalah supplier dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.

KARO HUKUM	KABAN	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

- 10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Pangan Daerah yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- 11. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 12. Tim Pendamping Program BLPD Provinsi Gorontalo adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 April 2020



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 10

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 10 TAHUN 2020  
TANGGAL : 6 April 2020  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN  
EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)

PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN  
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



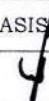

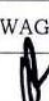
1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rangka pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah :

- 1) Penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin akibat pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- 2) Pemberian bantuan langsung pangan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang terdampak akibat pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.
- 3) Pemerintah Daerah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.

2. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan , Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)*.
- 3) Keputusan Pesiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)*.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*.
- 6) Instriksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766).

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutama bagi keluarga miskin
- 3) Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat (UMKM) yang memproduksi bahan pangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pangan ini.

Sedangkan sasaran bantuan pangan daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total sebanyak 53.418 KPM, yang datanya bersumber dari database DTKS, yang terdiri dari:

- 1) Masyarakat miskin yaitu para pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dll yang selama ini memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai Pemerintah Provinsi sebanyak 32.051 atau setara dengan 60% dari total sasaran.
- 2) Pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dll di masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 21.367 atau setara dengan 40% dari total sasaran, diluar KPM yang ditanggung Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berjumlah 32.051 KPM.

4. RUANG LINGKUP DAN PERIODE KEGIATAN

Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang melibatkan seluruh Kabupaten Kota se- Provinsi Gorontalo dalam pendanaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pangan bagi masyarakat miskin yaitu para pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dll di masing-masing Kabupaten Kota.

Sedangkan periode pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu mulai minggu pertama Bulan April 2020 (menjelang Bulan Ramadhan), satu minggu sebelum lebaran (bulan Mei 2020) dan satu minggu setelah lebaran (Bulan Juni 2020).

5. KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - a. Keluarga Penerima Manfaat adalah Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.
  - b. Calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada poin a, namun tidak masuk dalam DTKS, yang dalam “penilaian” Dinas terkait ikut terdampak, sebagai akibat ditetapkannya siaga darurat covid 19, harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan dan dipastikan kondisi social ekonominya, sebelum diusulkan untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat diluar data DTKS.
  - c. Jumlah total Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 53.418 KPM yang dibiayai melalui APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak 32.051 (60% dari total KPM) dan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota sebanyak 21.367 KPM (40% dari total KPM).
  - d. Jumlah KPM tersebut pada huruf c, dapat berubah dan menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota
  - e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah masyarakat terdampak COVID-19 yang terdiri dari para pengemudi bentor, ojek, pengemudi angkutan, pekerja serabutan,

KARO HUKUM	KABAN	ASIS TEN	SEKDA	WAGUB
				



pedagang kecil, dan lain-lain, yang selama ini menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 112/12/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 bahwa Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sebanyak 35.000 KPM dan setelah dilakukan verifikasi jumlah keluarga penerima manfaat pemberian bantuan langsung pangan daerah sebanyak 32.051 KPM. Daftar KPM per Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan, sebagaimana **Lampiran 1.A sd 1.F**

- f. Keluarga Penerima Manfaat yang dibiayai oleh Kabupaten/Kota adalah para pengemudi bentor, ojek, pengemudi angkutan, pekerja serabutan, pedagang kecil, dll yang terdampak COVID-19 sebanyak 21.367 KPM. KPM yang akan dilayani oleh Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus dilakukan pendataan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

2) Jenis Bantuan dan Nilai Bantuan

Jenis bahan pangan yang dapat disalurkan adalah beras, telur atau ikan, minyak goreng, kemasan atau minyak kelapa, dengan jumlah nilai bantuan per- Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk biaya distribusi dan biaya kemasan/packing sekali pelayanan sebesar Rp178.150,00/sekali penyaluran, sebanyak 3 kali penyaluran.

## 6. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

- a. KPM yang menerima bantuan pangan adalah keluarga miskin penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 112/12/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sejumlah 32.051 ditambah dengan KPM yang menjadi usulan Kabupaten/Kota yang bersumber dari DTKS dan Non DTKS (masyarakat terdampak Covid-19).
- b. Penetapan penerima bantuan sesuai pada poin a, dapat dilakukan perubahan (tambah/kurang) sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dengan tetap memperhatikan ketetapan kuota 60% Provinsi dan 40% Kabupaten/Kota.
- c. Mekanisme perubahan data penerima manfaat dilaksanakan rekonsiliasi data yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menyandingkan dan konfirmasi data dalam rangka menghindari double penerima, meninggal dunia, pindah, penerima manfaat bansos Kemensos (PKH, BPNT Pusat, dll)
- d. Penerima manfaat Bantuan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

2) Pembiayaan Penyediaan dana






Pembiayaan program bantuan langsung pangan daerah dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah Provinsi dan Kabuapten/Kota dalam bentuk *sharing* pembiayaan, yaitu 60% (enam puluh persen) oleh Pemerintahn Provinsi dan 40% (empat puluh persen) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi menyediakan dana untuk membiayai bantuan pangan dan biaya distribusi bagi 60% dari total KPM melalui APBD Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota membayai 40 % dari total KPM melalui APBD Kabupaten/Kota (diluar dana desa) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				








- b. Besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai 60% dari total KPM disetiap Kabupaten/Kota akan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur berupa Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota.
- 3) Transfer Dana Ke Kabupaten Kota  
Dana bantuan keuangan khusus bagi Kabupaten/Kota ditransfer dengan persyaratan sebagai berikut:
- Pemerintah Provinsi melakukan transfer dana secara bertahap sesuai tahapan sebagaimana diatur pada ketentuan angka 4.
  - Untuk transfer tahap I Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi
  - Untuk transfer Tahap II dan III Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi dan melampirkan Laporan Penyaluran Tahap sebelumnya.
- 4) Pangadaan Bantuan Pangan Bagi Kabupaten/Kota  
Pangadaan Bantuan Langsung Pangan Daerah dilakukan dengan mekanisme berikut:
- Dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Gorontalo dan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hanya digunakan untuk pengadaan bantuan pangan dan biaya distribusi sebagaimana dijelaskan pada angka 5, 2) b. Tabel 1 di atas.
  - Kabupaten/Kota melalui Dinas Teknis terkait bertanggungjawab melakukan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, dengan memprioritaskan Bahan Pangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Perka LKPP RI Nomor 13 Tahun 2018, pada lampiran I halaman 5, diuraikan dalam butir 2.1.1 (identifikasi kebutuhan), poin 3(b) "Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan". Dengan mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan dimaksud.
  - Pengadaan bantuan pangan ini disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tidak mengurangi jumlah atau jenis produk dan/atau biaya per paketnya.
- 5) Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah  
Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah dilakukan dengan mekanisme berikut:
- Bantuan Langsung Pangan Daerah hanya diberikan kepada KPM yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Pangan Daerah.
  - Penyaluran bantuan pangan sampai ke KPM dilakukan masing-masing Kabupaten/Kota dengan memberdayakan transportasi lokal seperti bentor, ojek, dan angkutan umum. Atas jasa penyaluran tersebut para pengemudi bentor, ojek, dan angkutan umum diberikan biaya distribusi yang besarnya diatur secara teknis dan disepakati oleh penyedia dan pengemudi angkutan (bentor, ojek, angkot dll).
  - Penyaluran Bantuan Pangan didampingi oleh Pendamping PKH.
  - Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah sampai kepada KPM dilakukan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 (menggunakan masker, menghindari potensi terjadinya kerumunan masa, dll).

KABO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



LAMPIRAN 1.A. KOTA GORONTALO

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM
1	KOTA BARAT	1 BULADU	103	3	KOTA TENGAH	1 DULALOWO	30
		2 BULIDE	149			2 DULALOWO TIMUR	62
		3 DEMBE I	306			3 LILUWO	61
		4 LEKOBALO	251			4 WUMIALO	70
		5 MOLOSIFAT W	49			JUMLAH	223
		6 PILOLODAA	125				
		7 TENILO	102				
		JUMLAH	1085	4	KOTA UTARA	1 DEMBE II	76
2	KOTA SELATAN	1 BIAWAO	36			2 DEMBE JAYA	132
		2 BIAWU	103			3 DULOMO	94
		3 LIMBA U I	71			4 DULOMO SELATAN	110
		4 LIMBA U II	50			5 WONGKADITI	212
						6 WONGKADITI BARAT	51
		JUMLAH	260			JUMLAH	675
						JUMLAH TOTAL	2243

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



LAMPIRAN I.B : KABUPATEN GORONTALO






NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM
1	ASPARAGA	1	BIHE	74	6	BOLIYOHUTO	1	BANDUNG REJO	41
		2	BONTULA	75			2	BONGONGOAYU	38
		3	BULULI	124			3	DILONIYOHU	42
		4	KARYA BARU	52			4	DULOHUPA	40
		5	KARYA INDAH	70			5	ILOHELUMA	41
		6	MOHIYOLO	71			6	MONGGOLITO	44
		7	OLIMOHULO	51			7	MOTODUTO	44
		8	PANGAHU	41			8	PARUNGI	46
		9	PRIMA	85			9	POTANGA	40
		10	TIOHU	87			10	SIDO MULYO	46
		JUMLAH	730	11			SIDODADI	47	
2	BATUDAA	1	BARAKATI	84			12	SIDOMULYO SELATAN	49
		2	BUA	87			13	TOLITE	42
		3	DUNGGALA	86			JUMLAH	560	
		4	HUNTU	64	1	BATU LORENG	107		
		5	ILOHUNGAYO	45	2	BATULAYAR	113		
		6	ILUTA	78	3	BONGOHULAWA	133		
		7	PAYUNGA	95	4	DULAMAYO	98		
		8	PILOBUHUTA	83	5	HUNTULOHULAWA	49		
		JUMLAH	622	6	KAYUMERAH	74			
3	BATUDAA PANTAI	1	BILUHU TIMUR	117	7	LIYODU	59		
		2	BONGO	65	8	LIYOTO	111		
		3	BUHUDAA	105	9	MOLANIHU	48		
		4	KAYUBULAN	184	10	MOLAS	117		
		5	LAMU	97	11	MOLOPATODU	89		
		6	LANGGULA	41	12	OTOPADE	135		
		7	LOPO	39	13	OWALANGA	93		
		8	OLIMOO'O	52	14	TOHUPO	193		
		9	TONTAYUO	65	15	UPOMELA	110		
0			JUMLAH	765			JUMLAH	1529	
4	BILATO	1	BILATO	51	8	DUNGALIYO	1	AMBARA	118
		2	BUMELA	38			2	AYUHULA	92
		3	ILOMATA	54			3	BONGOMEME	78
		4	JURIYA	56			4	BOTUBULOWE	139
		5	LAMAHU	45			5	DUNGALIYO	86
		6	MUSYAWARAH	40			6	DUWANGA	85
		7	PELEHU	57			7	KALIYOSO	84
		8	SUKA DAMAI	66			8	MOMALA	83
		9	TAULAA	62			9	PANGADAA	86
		10	TOTOPO	53			10	PILOLALENGA	66
		JUMLAH	522			JUMLAH	917		
5	BILUHU	1	BILUHU BARAT	121					
		2	BILUHU TENGAH	94					
		3	BOTUBOLU'O	56					
		4	HUWONGO	85					
		5	LOBUTO	121					
		6	LOBUTO TIMUR	68					
		7	LULUO	51					
		8	OLIMEYALA	61					
		JUMLAH	657						

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



LAMPIRAN I.B : KABUPATEN GORONTALO






NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM		
9	LIMBOTO	1	BIYONGA	85	13	TABONGO	1	ILOMANGGA	105		
		2	BOLIHUANGGA	103			2	LIMEHE BARAT	59		
		3	BONGOHULAWA	49			3	LIMEHE TIMUR	171		
		4	BULOTA	95			4	LIMEHU	78		
		5	DUTULANAA	59			5	MOAHUDU	43		
		6	HEPUHULAWA	86			6	MOTINELO	41		
		7	HUNGGALUWA	72			7	TABONGO BARAT	57		
		8	HUTUO	74			8	TABONGO TIMUR	151		
		9	KAYUBULAN	87			9	TERATAI	47		
		10	KAYUMERAH	43			JUMLAH		752		
		11	MALAHU	61			14	TELAGA	1	BULILA	76
		12	POLOHUNGO	68					2	DOLUHUPA	48
		13	TENILO	87					3	DULAMAYO BARAT	87
		14	TILIHUWA	89					4	DULAMAYO SELATAN	90
JUMLAH		1058	5	HULAWA	74						
10	LIMBOTO BARAT	1	DAENAA	102	6	LUHU			86		
		2	HAYA-HAYA	120	7	MONGOLATO			71		
		3	HUIDU	82	8	PILOHAYANGA			82		
		4	HUIDU UTARA	96	9	PILOHAYANGA BARAT			60		
		5	HUTABOHU	120	JUMLAH				674		
		6	OMBULO	109	1	DULAMAYO UTARA			75		
		7	PADENGO	93	2	DUMATI			68		
		8	PONE	98	3	LUPOYO			73		
		9	TUNGGULO	89	4	MODELLIDU			78		
		10	YOOSONEGORO	73	5	PANTUNGO	62				
JUMLAH		982	15	TELAGA BIRU	6	PENTADIO BARAT	90				
11	MOOTILANGO	1			HELUMO	58	7	PENTADIO TIMUR	69		
		2			HUYULA	45	8	TALUMELITO	95		
		3			KARYA MUKTI	23	9	TAPALULUO	56		
		4			PARIS	43	10	TIMUATO	81		
		5			PAYU	37	11	TINELO	47		
		6			PILOMONU	45	12	TONALA	83		
		7			SATRIA	44	13	TULADENGGI	70		
		8			SIDO MUKTI	28	14	ULAPATO.A	96		
		9			SUKA MAJU	37	15	ULAPATO.B	98		
		10			TALUMOPATU	19	JUMLAH		1141		
JUMLAH		379			16	TELAGA JAYA	1	BUHU	173		
12	PULUBALA	1					AYUMOLINGO	70	2	BULOTA	93
		2					BAKTI	95	3	BUNGGALO	60
		3					BUKIT AREN	46	4	HUTADAA	209
		4					MOLALAHU	97	5	LUWOO	60
		5	MOLAMAHU	87			JUMLAH		595		
		6	MULYONEGORO	99							
		7	PONGONGAILA	88							
		8	PULUBALA	43							
		9	PUNCAK	98							
		10	TOYDITO	98							
		11	TRIDARMA	62							
		12	UPT AYUMOLINGO	2							
JUMLAH		885									

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



LAMPIRAN I.B : KABUPATEN GORONTALO



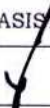


NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM
17	TIBAWA	1	BALAHU	46
		2	BOTUMOPUTI	107
		3	BUHU	98
		4	DATAHU	104
		5	DUNGGALA	90
		6	ILOMATA	145
		7	ILOPONU	136
		8	ISIMU RAYA	86
		9	ISIMU SELATAN	48
		10	ISIMU UTARA	136
		11	LABANU	105
		12	MOLOWAHU	82
		13	MOTILANGO	42
		14	REKSONEGORO	44
		15	TOLOTIO	48
		16	ULOBUA	122
		JUMLAH		1439
18	TILANGO	1	DULOMO	37
		2	ILOTIDEA	150
		3	LAUWONU	110
		4	TABUMELA	174
		5	TENGGEA	168
		6	TILOTE	69
		7	TINELO	75
		8	TUALANGO	68
		JUMLAH		851
19	TOLANGOHULA	1	BINA JAYA	42
		2	GANDARIA	50
		3	GANDASARI	50
		4	HIMALAYA	39
		5	LAKEYA	42
		6	MAKMUR ABADI	45
		7	MARGOMULYA	41
		8	MOLOHU	39
		9	OMBULO TANGO	41
		10	POLOHUNGO	43
		11	SIDOARJO	31
		12	SUKAMAKMUR	42
		13	SUKAMAKMUR UTARA	30
		14	TAMAILA	49
		15	TAMAILA UTARA	35
		JUMLAH		619
		JUMLAH TOTAL		15677

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



LAMPIRAN 1.C : KABUPATEN BOALEMO






NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM		
1	BOTUMOITO	1	BOLIHUTUO	58	5	PAGUYAMAN PANTAI	1	APITALAWU	61		
		2	BOTUMOITO	56			2	BANGGA	57		
		3	DULANGEYA	61			3	BUBAA	58		
		4	HUTAMONU	57			4	BUKIT KARYA	57		
		5	PATOAMEME	60			5	LIMBATIHU	63		
		6	POTANGA	57			6	LITO	55		
		7	RUMBIA	47			7	OLIBU	60		
		8	TAPADAA	60			8	TOWAYU	55		
		9	TUTULO	55			JUMLAH		466		
2	DULUPI	JUMLAH		511	6	TILAMUTA	1	AYUHULALO	99		
		1	DULUPI	55			2	BAJO	113		
		2	KOTARAJA	62			3	HUNGAYONAA	80		
		3	PANGI	52			4	LAHUMBO	101		
		4	POLOHUNGO	60			5	LAMU	86		
		5	TABONGO	54			6	LIMBATO	59		
		6	TANAH PUTIH	53			7	MODELOMO	60		
		7	TANGGA BARITO	58			8	MOHUNGO	114		
		8	TANGGA JAYA	57			9	PENTADU BARAT	114		
JUMLAH		451	10	PENTADU TIMUR			108				
3	MANANGGU	1	BENDUNGAN	47			7	WONOSARI	11	PILOLIYANGA	116
		2	BUTI	39					12	TENILO	69
		3	HARAPAN	1	JUMLAH				1119		
		4	KAARUYAN	38	1	DIMITO			60		
		5	KERAMAT	59	2	DULOHUPA			59		
		6	MANANGGU	56	3	HARAPAN			39		
		7	PILOLIYANGA	1	4	JATI MULYA			36		
		8	PONTOLO	48	5	MEKAR JAYA			51		
		9	RUMBIA	1	6	PANGEA			52		
		10	SALILAMA	53	7	RAHARJA			61		
		11	TABULO	48	8	SARI TANI			59		
		12	TABULO SELATAN	54	9	SUKA MAJU			55		
JUMLAH		445	10	SUKA MULIA	48						
4	PAGUYAMAN	1	BALATE JAYA	58	11	TANJUNG HARAPAN	53				
		2	BATU KRAMAT	57	12	TRI RUKUN	59				
		3	BONGO NOL	54	JUMLAH		632				
		4	BONGO TUA	58	JUMLAH TOTAL		4870				
		5	BUALO	56							
		6	DILATO	60							
		7	GIRISA	61							
		8	HULAWA	44							
		9	HUWONGO	50							
		10	KARYA MURNI	46							
		11	KUALA LUMPUR	61							
		12	MOLOMBULAHE	86							
		13	MUSTIKA	52							
		14	MUTIARA	58							
		15	PERMATA	56							
		16	REJONEGORO	49							
		17	SARIPI	54							
		18	SOSIAL	59							
		19	SUMBER JAYA	58							
		20	TANGKOBU	51							
		21	TENILO	58							
		22	WONGGAHU	60							
JUMLAH		1246									

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



LAMPIRAN 1.D : KABUPATEN POHUWATO



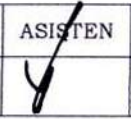

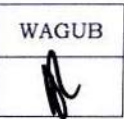
NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL		JML KPM		
1	BUNTULIA	1	BUNTULIA TENGAH	22	8	POPAYATO	1	BUKIT TINGKI	7		
		2	BUNTULIA UTARA	17			2	BUMI BAHARI	4		
		3	HULAWA	34			3	DAMBALO	18		
		4	KARYA INDAH	5			4	POPAYATO	8		
		5	SIPATANA	4			5	TELAGA	15		
		6	TALUDUYUNU	11			6	TELAGA BIRU	13		
		7	TALUDUYUNU UTARA	21			7	TOROSIAJE	54		
		JUMLAH		114					8	TOROSIAJE JAYA	52
2	DENGILO	1	HUTAMOPUTI	18					9	TRIKORA	3
		2	KARANGETAN	2					10	TUNAS HARAPAN	18
		3	KARYA BARU	27			JUMLAH		192		
		4	PADENGO	21	9	OPAYATO BARA	1	BUTUNGALE	12		
		5	POPAYA	20			2	DUDEWULO	17		
		JUMLAH		88			3	MOLOSIPAT	29		
3	DUHIADAA	1	BILILI	38			4	MOLOSIPAT UTARA	35		
		2	BUNTULIA BARAT	28			5	PADENGO	7		
		3	BUNTULIA JAYA	10			6	PERSATUAN	25		
		4	BUNTULIA SELATAN	11			7	TUNAS JAYA	1		
		5	DUHIADAA	8			JUMLAH		126		
		6	MEKAR JAYA	24	10	OPAYATO TIMU	1	BUNTO	8		
		7	MOOTILANGO	19			2	KELAPA LIMA	5		
8	PADENGO	5	3	LONDOUN			21				
		JUMLAH		143			4	MALEO	10		
4	LEMITO	1	BALOBALONGE	15			5	MARISA	25		
		2	KENARI	28			6	MILANGODAA	12		
		3	LEMITO	45			7	TAHELE	25		
		4	LEMITO UTARA	28			JUMLAH		106		
		5	LOMULI	17	11	RANDANGAN	1	AYULA	16		
		6	SUKA DAMAI	12			2	BANUROJA	4		
		7	WONGGARASI BARAT	31			3	HUYULA	9		
		8	WONGGARASI TENGAH	60			4	IMBODU	7		
		JUMLAH		236			5	MANUNGGAL KARYA	14		
5	MARISA	1	BOTUBILOTAHU INDAH	16			6	MOTOLOHU	8		
		2	BULANGITA	19			7	MOTOLOHU SELATAN	10		
		3	MARISA SELATAN	20			8	OMAYUWA	14		
		4	MARISA UTARA	11			9	PATUHU	13		
		5	PALOPO	26			10	PELAMBANE	7		
		6	POHUWATO	21			11	SARI MURNI	4		
		7	POHUWATO TIMUR	42			12	SIDORUKUN	15		
		8	TERATAI	25			13	SIDUWONGE	9		
		JUMLAH		180			JUMLAH		130		
6	PAGUAT	1	BUHU JAYA	43	12	TALUDITI	1	KALIMAS	5		
		2	BUMBULAN	30			2	MALANGO	9		
		3	BUNUYO	43			3	MEKARTI JAYA	10		
		4	KEMIRI	32			4	PANCA KARSA I	17		
		5	LIBUO	27			5	PANCA KARSA II	6		
		6	MALEO	31			6	PUNCAK JAYA	20		
		7	MOLAMAHU	24			7	TIRTO ASRI	17		
		8	PENTADU	44			8	UPT MARISA VB	12		
		9	SIDUAN	30			JUMLAH		96		
		10	SIPAYO	36	13	WANGGARASI	1	BOHUSAMI	7		
		11	SOGINTI	38			2	BUKIT HARAPAN	6		
		JUMLAH		378			3	LEMBAH PERMAI	4		
7	PATILANGGIO	1	BALAYO	27			4	LIMBULA	17		
		2	DUDEPO	13			5	TUWEYA	10		
		3	DULOMO	21			6	WANGGARASI TIMUR	11		
		4	ILO HELUMO	23			7	YIPILO	13		
		5	MANAWA	39			JUMLAH		68		
		6	SUKA MAKMUR	18			JUMLAH TOTAL		1998		
		JUMLAH		141							

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



LAMPIRAN 1.E : KABUPATEN BONE BOLANGO


NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM					
1	BONE	1	BILOLANTUNGA	16	8	KABILA	1	DUTOHE	42			
		2	CENDANA PUTIH	11			2	DUTOHE BARAT	65			
		3	ILOHUUWA	14			3	OLUHUTA	23			
		4	INO GALUMA	18			4	OLUHUTA UTARA	15			
		5	MASIAGA	14			5	PADENGO	42			
		6	MOLAMAHU	16			6	PAUWO	52			
		7	MONANO	11			7	POOWO	56			
		8	MOODULIO	14			8	POOWO BARAT	27			
		9	MUARA BONE	6			9	TALANGO	26			
		10	PERMATA	10			10	TANGGILINGO	49			
		11	SOGITIA	23			11	TOTO SELATAN	49			
		12	TALUDAA	18			12	TUMBIHE	32			
		13	TUMBUH MEKAR	9						JUMLAH	478	
		14	WALAHU	8								
			JUMLAH	188								
2	BONE RAYA	1	ALO	29	9	KABILA BONE	1	BILUANGO	35			
		2	BUNGA	35			2	BINTALAE	19			
		3	INOMATA	32			3	BOTUBARANI	28			
		4	LAUT BIRU	33			4	BOTUTONUO	39			
		5	MOOPIYA	27			5	HUANGOBOTU	46			
		6	MOOTAWA	12			6	MODELOMO	36			
		7	MOOTAYU	5			7	MOLOTABU	67			
		8	MOOTINELO	12			8	OLELE	56			
		9	TOMBULILATO	17			9	OLUHUTA	86			
			JUMLAH	202				JUMLAH	412			
3	BOTU PINGGE	1	BUATA	34	10	SUWAWA	1	BOLUDAWA	103			
		2	LUWOHU	10			2	BUBE	21			
		3	PANGGULO	33			3	BUBE BARU	86			
		4	PANGGULO BARAT	21			4	BUBEYA	65			
		5	SUKMA	3			5	HELUMO	24			
		6	TANAH PUTIH	30			6	HULUDUOTAMO	39			
		7	TIMBUOLO	22			7	TINELO	112			
		8	TIMBUOLO TENGAH	21			8	TINGKOHUBU	48			
		9	TIMBUOLO TIMUR	33			9	TINGKOHUBU TIMUR	31			
			JUMLAH	207				10	ULANTA	73		
			JUMLAH	207				JUMLAH	602			
4	BULANGO SELATAN	1	AYUHULA SELATAN	18	11	SUWAWA SELATAN	1	BONDA RAYA	44			
		2	AYUHULA TILANGO	28			2	BONDAWUNA	48			
		3	AYUHULA TIMUR	12			3	BONEDAA	58			
		4	AYUHULA UTARA	26			4	BULONTALA	33			
		5	HUNTU BARAT	35			5	BULONTALA TIMUR	61			
		6	HUNTU SELATAN	21			6	LIBUNGO	29			
		7	HUNTU UTARA	27			7	MOLINTOGUPO	103			
		8	LAMAHU	25			8	PANCURAN	31			
		9	SEJAHTERA	19						JUMLAH	407	
			JUMLAH	211				1	ALALE	21		
5	BULANGO TIMUR	1	BULONTALANGI	47	12	SUWAWA TENGAH	2	DUANO	45			
		2	BULONTALANGI BARA	52			3	LOMBONGO	52			
		3	BULONTALANGI TIMU	45			4	LOMPOTOO	27			
		4	POPODU	44			5	TAPADAA	35			
		5	TOLUWAYA	17			6	TOLOMATO	29			
			JUMLAH	205				JUMLAH	209			
6	BULANGO ULU	1	ILOMATA	37	13	TAPA	1	DUNGGALA	45			
		2	MONGILO	65			2	KRAMAT	16			
		3	MONILO UTARA	57			3	LANGGE	34			
		4	OWATA	74			4	MERANTI	36			
		5	PILOLAHEYA	43			5	TALULOBUTU	26			
		6	SUKA MAKMUR	41			6	TALULOBUTU SELATAN	17			
			JUMLAH	317				7	TALUMOPATU	32		
7	BULANGO UTARA	1	BANDUNGAN	32	14	TILONGKABILA				JUMLAH	206	
		2	BOIDU	13			1	BERLIAN	16			
		3	BUNUO	14			2	BONGOHULAWA	41			
		4	KOPI	15			3	BONGOIME	96			
		5	LOMAYA	32			4	BONGOPINI	27			
		6	LONGALO	30			5	BUTU	53			
		7	SUKA DAMAI	19			6	ILOHELUMA	61			
		8	TULOA	32			7	LONUO	61			
		9	TUPA	16			8	MOTILANGO	80			
			JUMLAH	203						9	MOUTONG	36
										10	PERMATA	77
										11	TAMBOO	69
										12	TOTO UTARA	52
										13	TUNGGULO	102
								14	TUNGGULO SELATAN	23		
								JUMLAH	794			
								JUMLAH TOTAL	4641			

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				




LAMPIRAN 1.F : KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM	NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JML KPM		
1	ANGGREK	1	DATAHU	8	6	MONANO	1	DUNU	21
		2	DUDEPO	46			2	GARAPIA	16
		3	HELUMO	38			3	MOKONOWU	10
		4	HIYALOOILE	37			4	MONANO	8
		5	IBARAT	47			5	MONAS	13
		6	ILANGATA	33			6	PILOHULATA	10
		7	ILODULUNGA	12			7	SOGU	18
		8	ILOHELUMA	36			8	TOLITEHUYU	11
		9	LANGGE	26			9	TUDI	13
		10	MOTILANGO	24			10	ZURIYATI	12
		11	POPALO	13	JUMLAH		132		
		12	PUTIANA	42	7	PONELO KEPULAUAN	1	MALAMBE	25
		13	TOLANGO	64			2	OTIOLA	41
		14	TOLONGIO	36			3	PONELO	33
		15	TUTUWOTO	16			4	TIHENGGO	69
		JUMLAH	478			JUMLAH	168		
2	ATINGGOLA	1	BINTANA	10	8	SUMALATA	1	BULOILA	6
		2	BUATA	6			2	BULONTIO BARAT	20
		3	ILOHELUMA	18			3	BULONTIO TIMUR	26
		4	ILOMATA	32			4	HUTAKALO	27
		5	IMANA	26			5	KASIA	11
		6	KOTA JIN	1			6	KIKIA	14
		7	KOTAJIN UTARA	6			7	LELATO	8
		8	OLUHUTA	12			8	MEBONGO	21
		9	PINONTYOYONGA	8			9	PULOHENTI	30
		10	POSONO	4			10	PUNCAK MANDIRI	15
		11	SIGASO	12			11	TUMBA	18
		12	TOMBULILATO	20	JUMLAH		196		
		13	WAPALO	5			JUMLAH	160	
3	BIAU	1	BIAU	11	9	SUMALATA TIMUR	1	BUBALANGO	8
		2	BOHULO	35			2	BULADU	5
		3	BUALO	19			3	BULUWATU	4
		4	DIDINGGA	29			4	DEME I	13
		5	LUHUTO	9			5	DEME II	14
		6	OMUTO	16			6	DULUKAPA	8
		7	POTANGA	22			7	HULAWA	16
		8	SEMBIHINGAN	2			8	KOLUWOKA	21
		9	TOPI	14			9	MOTIHELUMO	30
		10	WINDU	6			10	WUBUDU	21
		JUMLAH	163			JUMLAH	140		
4	GENTUMA RAYA	1	BOHUSAMI	2	10	TOLINGGULA	1	CEMPAKA PUTIH	3
		2	DUMOLODO	37			2	ILOMANGGA	5
		3	DURIAN	21			3	ILOTUNGGULA	36
		4	GENTUMA	9			4	LIMBATO	13
		5	IPILO	42			5	MOLANGGA	10
		6	KETAPANG	20			6	PAPUALANGI	14
		7	LANGKE	13			7	TOLINGGULA PANTAI	27
		8	MOLONGGOTA	45			8	TOLINGGULA TENGAH	14
		9	MOTOMINGO	29			9	TOLINGGULA ULU	11
		10	NANATI JAYA	15			10	TOLITE JAYA	14
		11	PASALAE	8	JUMLAH		147		
5	KWANDANG	1	ALATA KARYA	15	11	TOMILITO	1	BUBODE	35
		2	BOTUNGOBUNGO	30			2	BULANGO RAYA	47
		3	BOTUWOMBATO	18			3	DAMBALO	45
		4	BUALEMO	52			4	HUIDU MELITO	53
		5	BULALO	37			5	JEMBATAN MERAH	12
		6	CISADANE	36			6	LEYAO	27
		7	KATIALADA	8			7	MILANGO	16
		8	LEBOTO	25			8	MOLANTADU	48
		9	MASURU	33			9	MUTIARA LAUT	12
		10	MOLINGKAPOTO	20			10	TANJUNG KARANG	37
		11	MOLINGKAPOTO SELA	15	JUMLAH		332		
		12	MOLUO	9	JUMLAH TOTAL		2622		
		13	MOOTINELO	43					
		14	OMBULODATA	44					
		15	PONTOLO	7					
		16	PONTOLO ATAS	29					
		17	POSSO	26					
		18	TITIDU	18					
		JUMLAH	465						



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :

Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEK. DA	WAGUB



DAFTAR ALOKASI BANTUAN LANGSUNG BAHAN PANGAN DAERAH DAN BIAYA DISTRIBUSI							
SE PROVINSI GORONTALO							
Lampiran 1.G							
NO	KABUPATEN/KOTA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH PENERIMA	NILAI BANTUAN/ PELAYAN	VOLUME LAYANAN (KALI)
A	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO						
1	Beras	5	Kg.				
2	Telur	1	Bag				
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter				
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.				
5	Gula Semut	250	Gr				
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.				
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck				
	SUB TOTAL PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO			178.150	32.051	5.709.885.650	3
B	KABUPATEN/KOTA						
I	KOTA GORONTALO						
1	Beras	5	Kg.				
2	Telur	1	Bag				
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter				
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.				
5	Gula Semut	250	Gr				
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.				
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck				
	SUB TOTAL KOTA GTLO			178.150	1.495	266.334.250	3
II	KABUPATEN GORONTALO						
1	Beras	5	Kg.				
2	Telur	1	Bag				
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter				
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.				
5	Gula Semut	250	Gr				
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.				
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck				
	SUB TOTAL KAB GORONTALO			178.150	10.451	1.861.845.650	3
III	KABUPATEN BOALEMO						
1	Beras	5	Kg.				
2	Telur	1	Bag				
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter				
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.				
5	Gula Semut	250	Gr				
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.				
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck				
	SUB TOTAL KAB BOALEMO			178.150	3.247	578.453.050	3
IV	KABUPATEN BONE BOLANGO						
1	Beras	5	Kg.				
2	Telur	1	Bag				
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter				
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.				
5	Gula Semut	250	Gr				
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.				
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck				
	SUB TOTAL KAB BONE BOLANGO			178.150	3.094	551.196.100	3
V	KABUPATEN POHUWATO						
1	Beras	5	Kg.				
2	Telur	1	Bag				
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter				
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.				
5	Gula Semut	250	Gr				
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.				
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck				
	SUB TOTAL KAB POHUWATO			178.150	1.332	237.295.800	3
VI	KABUPATEN GORONTALO UTARA						
1	4l	5	Kg.				
2	Telur	1	Bag				
3	Minyak Goreng Kemasan	1	liter				
4	Ikan Olahan/Segar	1	Pack/Kg.				
5	Gula Semut	250	Gr				
6	Biaya Distribusi	1	Pack/Kg.				
7	Biaya Kemasan/Packing	1	Pck				
	SUB TOTAL KAB GORONTALO UTARA			178.150	1.748	311.406.200	3
	SUB TOTAL KABUPATEN/KOTA						11.419.593.150
	TOTAL						28.549.250.100



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo